

KONFLIK ANTARDESA
(Sebuah Kajian Sosisologis tentang Kekerasan Kolektif
di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)
INTER-VILLAGE CONFLICT
(*Sociological Analysis on Collective Violence in
Kedungbanteng District, Banyumas Regency*)

Oleh:

Tri Wuryaningsih, Edy Suyanto, Tri Rini W., dan Tyas Retno W.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed Purwokerto

(Diterima: 10 Agustus 2004, disetujui: 30 Agustus 2004)

ABSTRAK

Penelitian bertujuan ingin mengetahui kondisi yang mendukung munculnya konflik antardesa di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik analisis model interaktif. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui indepth interview, focused group discussion, serta observasi dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pendukung munculnya konflik antardesa di Kecamatan Kedungbanteng sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk dan banyaknya penduduk usia produktif yang menganggur, terutama di Kelurahan Beji. Penelitian ini juga mengungkap bahwa di antara kedua desa memiliki pandangan negatif terhadap pihak lain. Masyarakat Kelurahan Beji melihat bahwa orang Karangnangka memiliki karakter sok priyayi, sombong, individualistis, dan suka memanfaatkan kedekatan mereka dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Walaupun jumlah penduduk yang menjadi pegawai jumlahnya tidak jauh berbeda dibanding Desa Beji, namun mereka itu kebanyakan keturunan orang-orang yang memiliki “pengaruh” di desa tersebut. Sebaliknya, masyarakat Karangnangka melihat orang-orang Beji sebagai orang yang kasar, reseh, sekarepe dhewek. Menurut “sejarah,” dahulu di Beji ada sebuah Perguruan Silat “Asma,” sehingga di masa lalu orang-orang Beji sangat ditakuti oleh masyarakat Kedungbanteng dan sekitarnya. Meski masa itu telah lama berlalu, namun tampaknya sisa-sisa “kejawaraan” mereka masih ada. Di antara berbagai faktor pendukung tersebut, tampaknya perebutan sumber air merupakan faktor yang utama. Masyarakat Beji yang banyak memiliki kolam ikan sebagai sumber hidup mereka, sering berebut air – terutama pada musim kemarau dengan masyarakat Karangnangka, yang kebetulan letaknya di atas.

Kata kunci: Konflik antardesa

ABSTRACT

Research aimed to know supporting conditions for inter-village conflicts in that area. The research was done by qualitative method with interactive model to analyse it. Meanwhile purposive sampling technique used to take on informants. The data used are primary data collected by in-depth interview, focused group discussion and observations as well as secondary data. The result of research showed that supporting conditions for inter-village conflict in Kedungbanteng District related to socio-

Sub district. The research revealed negative view each other between Beji and Karangnangka residents. Beji residents perceived Karangnangka people as bourgeois, big mouth, individualist, and tend to take advantage from being close to people in power. While the number of Karangnangka people being state employer was not far from Beji, many of them were influential people's descent. On the other hand, Karangnangka residents perceived Beji people as rude, troublemaker, and selfish. According to history, whatever it means, there was a martial art school called "Asma" in Beji as now Beji people were to be afraid by Kedungbanteng community. However it was a past, there was remaining vigilant attitude in them. From many supporting conditions, it was water resource conflict the main factor. Beji people had a lot of fish pool as their living resource, thus involved in water conflict primarily in dry season— with Karangnangka people, whom placed at a higher ground.

Keywords : inter-village conflict

PENDAHULUAN

Kondisi yang tampak seiring dengan krisis multidimensional di Indonesia, yaitu meningkatnya kejahatan sosial, kerusuhan sosial atau kekerasan kolektif antaretnik, agama, dan kelompok, yang sangat mempengaruhi tumbuhnya disintegrasi sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam buku Mas' oed dkk. (2001) terungkap bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 1995 – Juni 1997 telah terjadi 20 kali kerusuhan besar di Indonesia. Frekuensi ini belum termasuk kerusuhan di Sampit, Ambon, dan beberapa kota lainnya yang terjadi setelah kurun waktu tersebut. Konflik antardesa yang terjadi di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, barangkali hanya merupakan sebagian kecil dari gambaran kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia yang lepas dari pengamatan para peneliti.

Tindak kekerasan muncul karena ada kondisi yang

menghalangi anggota masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dan harapan-harapan mereka. Kondisi-kondisi tersebut bisa berdimensi sosial, kultural, ekonomi, maupun politik. Menurut D.O. Sears (dalam Putri, 2001), konflik akan terjadi secara kolektif dalam masyarakat karena adanya kesenjangan relatif. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan adanya ketidakpuasan dalam kelompok yang tidak hanya timbul dari kesenjangan secara objektif, tetapi juga perasaan kurang secara subjektif yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok atau orang lain. Bila seseorang atau kelompok merasa adanya "kekurangan" dibandingkan dengan kelompok lain, maka mereka akan mengungkapkan kejengkelan melalui an-organisme kelompok. Sears (dalam Putri, 2001) juga menjelaskan bahwa penyebab lain konflik antarkelompok adalah apabila kedua kelompok bersaing untuk saling memperebutkan sumber daya yang langka. Kedua

prasangka merupakan konsekuensi dari konflik yang nyata yang tidak dapat dielakkan. Namun demikian, menurut Smelser (dalam Marzali, 2001) kekerasan sosial atau *collective behavior* hanya dapat terjadi jika dipenuhi enam kondisi sebagai berikut: 1) struktur sosial yang kondusif bagi munculnya kekerasan sosial, 2) adanya ketegangan struktural, 3) adanya keyakinan bersama di kalangan pelaku kekerasan sosial tentang sebab dari ketegangan, 4) adanya faktor psikologis, 5) adanya massa yang dimobilisasi oleh pemimpin, dan 6) tidak ada atau lemahnya kontrol sosial.

Tindak kekerasan kolektif dilihat dari pihak-pihak yang terlibat (kasus Tasikmalaya, Pekalongan, Ambon, Sambas) pada umumnya berbeda baik etnik maupun agama, atau mereka adalah kaum pribumi – pendatang (non pribumi). Namun demikian, tidak semua kekerasan kolektif bersumber dari etnik, agama atau asal-usul yang berbeda. Salah satunya, konflik antardesa yang melibatkan masya-rakat Kelurahan Beji dan Karangnangka di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Mereka yang terlibat dalam aksi tersebut tidak berbeda etnik maupun agamanya. Dilihat dari asal-usulnya, mereka juga sama-sama pribumi (bahkan di antara mereka masih ada ikatan saudara). Berangkat dari hal

tersebut, kondisi-kondisi apakah yang mendukung munculnya konflik antardesa di wilayah tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji. Sesuai dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi pendukung munculnya konflik antardesa di Kecamatan Kedungbanteng. Dengan terungkapnya kondisi-kondisi pendukung tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya rekonsiliasi di antara warga masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas kajian konflik dari sudut pandang sosiologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus sampai dengan Oktober 2003 di Kecamatan Kedungbanteng (Desa Beji dan Karangnangka) Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik analisis model interaktif. Sasaran utama penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, para tokoh pemuda, para tokoh masyarakat, serta aparat keamanan sebagai sasaran pendukung yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui *indepth interview*, *focused group*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Sekilas tentang Kekerasan Kolektif di Kecamatan Kedungbanteng

Seperti dituturkan oleh salah seorang informan bernama Bp. Sas. dari Desa Karangnangka, konflik yang melibatkan warga Desa Beji dan Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng sebenarnya sudah lama dan sering terjadi, namun biasanya tidak pernah melibatkan massa yang begitu besar. Mereka yang terlibat biasanya anak-anak muda yang marah karena persoalan sepele, seperti mengambil burung di atap rumah orang tanpa “kulanuwun”, tersinggung dengan ucapan tertentu, dan lain-lain.

Kekerasan kolektif yang terjadi di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 April 2000 antara warga Desa Beji dan Karangnangka, yang bertetangga desa, merupakan konflik terbesar sepanjang sejarah konflik yang melibatkan kedua desa tersebut. Tawuran tersebut melibatkan massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Kedua pihak yang berkonflik bersenjatakan golok, parang, celurit, batu, dan lain-lain. Pada tanggal itu, sekitar jam 17.00 – 19.00, massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang tersebut berkumpul di perbatasan desa. Bentrokan fisik antarmassa belum sempat terjadi karena aparat keamanan datang mencegahnya. Namun sebelumnya, sekitar jam 15.00 – 16.00, warga Karangnangka sempat melakukan

pembakaran gubuk, tanaman di sawah, dan membobol kolam-kolam ikan warga Beji yang letaknya di perbatasan desa. Setelah insiden tersebut, polisi menjaga Desa Beji selama kurang-lebih sebulan, guna mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.

Konflik tersebut dipicu oleh pertandingan sepakbola antardesa di Lapangan Desa Keniten, tanggal 8 April 2000. Dalam pertandingan tersebut, bertemu tim Desa Beji dan Desa Karangnangka, yang dimenangkan tim Beji. Menurut salah seorang informan asal Desa Beji, warga Karangnangka tidak senang atas kemenangan tim Beji, karena khawatir di kemudian hari tim desanya bertemu tim Beji. Sepulang dari pertandingan, para suporter Desa Beji meluapkan kegembiraan mereka dengan meneriakkan yel-yel sepanjang jalan, termasuk ketika melewati Desa Karangnangka. Pada tanggal 15 April 2000, tim Beji bertanding melawan tim Dawuhan Kulon di Desa Karangnangka. Namun pertandingan dihentikan karena terjadi keributan antara penonton dengan pemain yang dipicu kepemimpinan wasit yang – oleh suporter Beji dianggap tidak adil. Karena dianggap sebagai biang keributan, tim Beji dianggap kalah (di-WO-kan). Para suporter tim Beji melampiaskan kekecewaan dan kemarahan mereka dengan merusak lampu jalan Desa Karangnangka. Warga setempat marah dan mengancam warga Beji.

Esok harinya, sambil menanti

dari menonton pertunjukan barongsai, di perbatasan kedua desa, mereka yang berjumlah sekitar dua puluh orang, mencegat dan menganiaya seorang warga Karangnangka. Setelah kejadian tersebut, warga Karangnangka yang marah mengerahkan massa sejumlah kurang lebih 200-an orang untuk merusak tanaman dan kolam ikan warga Beji yang letaknya di perbatasan desa.

Mengetahui kejadian tersebut, warga Beji pun segera mengerahkan massa. Namun sebelum tawuran terjadi, aparat keamanan yang segera datang dapat m e n c e g a h n y a d a n “mengamankan” orang-orang yang dianggap sebagai “biang kerok.”

Kondisi - Kondisi Pendukung Munculnya Konflik Antardesa di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas

Sekalipun konflik yang berskala besar yang melibatkan warga Desa Beji dan Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng baru terjadi sekali, namun menurut penuturan Bp. Sas. (Kepala Desa Karangnangka), sebenarnya konflik yang melibatkan warga di kedua desa tersebut sudah lama dan sering terjadi. Bahkan setelah konflik tanggal 16 April 2000, konflik kecil pun masih sering terjadi. Seolah-olah kedua desa yang letaknya bersebelah-an (hanya dipisahkan oleh areal persawah-an) tersebut merupakan musuh bebuyutan yang senantiasa menyimpan masalah.

Penelitian ini mencoba menelaah secara mendalam faktor-faktor pendukung munculnya konflik tersebut. Dalam penelitian ini dipisahkan antara kondisi (condition) dan pemicu (prescription). Kondisi di sini menyangkut kondisi sosial, kultural, psikologi, ekonomi dan politik yang memunculkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan frustrasi dalam masyarakat. Sementara faktor pemicu sendiri adalah kejadian sebenarnya yang sekadar meletupkan ketidakpuasan itu menjadi kerusuhan massal.

Pertama-tama, peneliti akan melihat bagaimana gambaran umum kedua desa yang berkonflik, yakni Desa Beji dan Desa Karangnangka. Desa Beji merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungbanteng yang memiliki wilayah cukup luas, yaitu 239,15 ha, yang terbagi ke dalam 2 dusun (Beji Gunung dan Beji Lebak), 9 RW dan 34 RT. Desa Beji sendiri cukup dikenal masyarakat luas, karena di desa tersebut terdapat sebuah pondok pesantren yang cukup besar, yaitu Ponpes Al-Ikhsan yang santrinya datang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, bahkan Sumatera. Letak Desa Beji cukup strategis, karena tidak terlalu jauh dari Kampus Universitas Wijaya Kusuma, universitas swasta yang cukup berkompeten di Purwokerto. Tidak pelak lagi, Desa Beji banyak bersinggungan dengan budaya luar. Jumlah penduduk di Desa Beji cukup besar, yaitu berjumlah 7.175 jiwa yang terbagi ke dalam 184 KK,

Karangnangka cukup dekat dengan pusat kota Kecamatan Kedungbanteng, namun jika dilihat dari Purwokerto, relatif lebih jauh. Penduduk Desa Karangnangka berjumlah 3.491 jiwa dan tingkat kepadatan penduduknya 1,8 jiwa/km², jauh lebih kecil dibanding Desa Beji.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi sosial yang lebih rinci dari kedua desa tersebut, akan ditampilkan aspek kependudukan dilihat dari tingkat pendidikan dan mata pencaharian penduduk.

Tabel 1. Penduduk Desa Beji dan Desa Karangnangka Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Desa Beji		Desa Karangnangka	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Buta huruf	1.184	26,54	-	-
2.	Tidak tamat SD	727	16,30	60	1,74
3.	Tamat SD	314	7,04	1.519	44,20
4.	Tamat SLTP	1.394	31,25	996	29,00
5.	Tamat SLTA	782	17,53	782	22,76
6.	Tamat PT	60	1,34	79	2,30
	Jumlah	4.461	100,00	3.436	100,00

Sumber: Monografi Desa Beji dan Desa Karangnangka tahun 2002.

Dengan membandingkan data kedua desa, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok. Penduduk Desa Beji memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding penduduk Desa Karangnangka hampir di semua jenjang pendidikan. Bahkan angka buta huruf di Desa Beji masih cukup tinggi yaitu, 26,54 persen, dan jumlah penduduk yang tidak tamat SD juga masih cukup tinggi, yaitu sebesar 16,30 persen. Kondisi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah ini berpengaruh signifikan pada pola

tingkah laku mereka. Hal ini juga diakui oleh beberapa informan yang kebetulan merupakan tokoh masyarakat Desa Beji, bahwa kondisi tersebut sangat mempengaruhi munculnya tindakan premanisme di kalanganarganya.

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Desa Beji juga berimplikasi terhadap cara pandang mereka dalam menanggapi suatu persoalan. Salah satunya adalah pandangan mereka tentang polisi. Mereka menyatakan tidak suka melapor ke polisi jika menghadapi

kasus tertentu.

Salah seorang informan bernama Mun, yang kebetulan juga terlibat langsung dalam kerusuhan mengatakan:

“Kami memang tidak suka lapor-lapor ke polisi jika menghadapi persoalan. Dan justru kuwe sing jantan, ana masalah apa-apa diadepi dhewek, ora pengecut. (Pen: justru itu yang jantan, ada masalah apa-apa dihadapi sendiri, tidak pengecut...).”

Cara pandang tersebut juga terlontar dari salah seorang pelaku kerusuhan yang memandang warga Desa Karangnangka sebagai

Salah seorang informan dari Desa Karangnangka bernama Roh, yang kebetulan menjadi korban pengeroyokan warga Desa Beji menuturkan:

“Ketika saya dicegat oleh pemuda Beji, mereka teriak-teriak, he... wong Karangnangka ya? Dasar bangsat. Wong Karangnangka pengecut, wanine nek ana polisi. Ngeneh maju siji-siji. Nek wani ngeneh maju. (Pen: He.., orang Karangnangka ya, memang bangsat. Orang Karangnangka pengecut. Sini maju satu-satu. Ayo kalau berani maju).”

Perilaku warga Beji tersebut juga tidak terlepas dari bagaimana warga Beji memandang dirinya. Horton dan Hunt (1991) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan kolektif adalah apabila di dalam interaksi sosial antara self-group dan other group masing-masing merasakan adanya kelemahan di dalam diri kelompoknya dibanding dengan kelompok lawannya, akan

cenderung meningkatkan dan memaksimalkan sifat-sifat yang dirasa lebih unggul untuk memperkuat rasa superiornya, baik dengan kekerasan ataupun cara lain. Menurut penuturan salah seorang informan dari Beji (50 tahunan), orang Beji mempunyai kejayaan masa lalu dan seringkali tidak mau kalah. Ia mengatakan:

“Ketika saya muda dulu (ket: sekarang usianya mencapai 50 tahun), pemuda Beji hampir menguasai di wilayah Kecamatan Kedungbanteng, karena ada perguruan pencak silat 'ASMA' sehingga orang lain desa tidak berani”.

Citra diri tersebut ternyata masih dimiliki generasi-generasi muda sekarang, mereka menganggap bahwa dirinya “jagoan” dan menangan. Hal ini semakin memperkuat perilaku mereka untuk selalu membuat keributan.

Informasi lain yang juga menggam-barkan kondisi sosial-

Tabel 2. Penduduk Desa Beji dan Desa Karangnangka Menurut Matapencaharian

No	Mata Pencaharian	Desa Beji		Desa Karangnangka	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Petani	1292	62,11	420	23,78
2.	Buruh tani	204	9,80	541	30,63
3.	Buruh industri	-	-	4	0,23
4.	Buruh bangunan	342	16,44	28	1,59
5.	Pedagang	102	4,90	29	1,59
6.	Pengangkutan	3	0,15	-	-
7.	PNS/ABRI	76	3,66	54	3,06
9.	Pensiunan	27	1,30	21	1,19
10.	Pengusaha sedang	34	1,64	2	0,11
11.	Lain-lain	-	-	667	37,77
	JUMLAH	2080	100	1766	100

Sumber: Monografi Desa Beji dan Desa Karangnangka tahun 2002.

T a b e l 2 d i a t a s memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Beji dan Desa Karangnangka bekerja di sektor pertanian. Perbedaan yang agak mencolok antara keduanya adalah jumlah buruh bangunan di Desa Beji yang cukup besar, yaitu 16,44 persen, sementara jumlah buruh bangunan di Desa Karangnangka hanya sebesar 1,59 persen, meski secara umum kedua desa itu tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Namun demikian, di kalangan masyarakat Desa Beji terbangun kesan bahwa masyarakat Desa Karangnangka dianggap sebagai masyarakat Priyayi. Setelah ditelusuri lebih jauh melalui wawancara mendalam, ternyata sekalipun jumlah PNS di Desa Karangnangka jumlahnya hampir sama dengan jumlah PNS di Desa Beji, namun menurut informasi dari beberapa informan bahwa jumlah PNS yang sedikit tersebut merupakan keturunan orang-orang kuat atau “berpengaruh” di desa tersebut. Mereka kebanyakan bekerja di instansi-instansi pemerintah dengan pangkat yang lebih tinggi. Sementara itu, PNS yang ada di Desa Beji sebagian besar hanya merupakan pegawai negeri yang menurut mereka berada di level bawah. Di Desa Beji sendiri, hanya beberapa orang yang bekerja menjadi ABRI atau Polisi, itu pun dengan pangkat yang relatif rendah. Sementara anggota ABRI atau Polisi yang ada di Desa Karangnangka – sekalipun jumlahnya juga sedikit – umumnya memiliki pengaruh yang

lebih kuat. Salah seorang anggota Polisi yang ada di Desa Karangnangka berstatus sebagai Kapolsek di Kecamatan Karanglewas. Adanya orang-orang yang dianggap “berpengaruh” di Desa Karangnangka memunculkan kesan di masyarakat luar, bahwa mereka yang jumlahnya sedikit tersebut, dianggap mewakili karakteristik masyarakat Desa Karangnangka pada umumnya.

Informasi lain yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi penduduk di kedua desa tersebut adalah informasi tentang jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Desa Beji sebesar 4.975 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah bekerja berjumlah 2.080 orang, artinya angka pengangguran yang ada sebesar 58,19 persen dari total jumlah angkatan kerja yang ada. Sementara itu, jumlah penduduk angkatan kerja di Desa Karangnangka sebesar 2.094 orang, dan jumlah penduduk yang sudah bekerja sebesar 1.766 orang, artinya angka pengangguran yang ada sebesar 328 orang atau 15,66 persen dari total jumlah angkatan kerja yang ada.

Angka pengangguran di kedua desa tersebut, memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok. Tingkat pengangguran di Desa Beji jauh lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran di Desa Karangnangka. Menurut Durkheim (dalam Waxman, 1977) bahwa population density menyebabkan

jalan. Tak jarang mereka mabuk-mabukan dan tak segan-segan melakukan pemalakan pada orang-orang yang kebetulan lewat di dekat mereka. Bahkan seringkali mereka melakukan tindak pencurian di desa sen-diri. Kondisi ini sangat mendukung untuk terjadinya kerusuhan, terutama jika berkaitan dengan para pengangguran tersebut.

Image yang dimiliki kedua warga desa dalam memandang pihak lain juga sering menjadi penyebab munculnya konflik di antara mereka. Mead (dalam Sunarto, 1998) menyatakan bahwa tindakan seseorang atas sesuatu, akan sangat bergantung dari seseorang tersebut memberikan makna (meaning) atas sesuatu tersebut. Salah seorang informan dari Desa Karangnangka bernama Wid menuturkan, bahwa ketidaksukaan warga Desa Karangnangka disebabkan karakter warga Beji yang buruk, yang menurutnya:

“... wong Beji angger dolanan dara sok sekarepe dhewek. Mlebu pekarangane wong oraanganggo sopan santun, malahan kadhang njukut darane wong angger dara sing digoleti langka utawa nemu dara sing apik. Wong Beji angger bali nonton keramean (bal, dangdut dsb) lewat Karangnangka karo nggrusak apa-apa sing neng gili, malah kadhang karo nyolong degan. Nek ana wong kelangan (kaya grameh) pelakune sing sering wong Beji. Wong Beji (terutama bocah nome) reseh lan sok jagoan.”

Sementara itu, image yang berkemb-ang di kalangan warga Desa Beji dalam memandang warga

Desa Karangnangka se-perti dituturkan beberapa informan adalah bahwa orang Karangnangka itu sombong. Meskipun setiap hari bertatap muka, tidak pernah menyapa, atau dalam terminologi Banyumas istilahnya mblusnung, angkuh, individualis, dan sok priyayi. Mereka cenderung memanfaatkan kedekatannya dengan sumber-sumber kekuasaan (polisi, pamong desa, dan lain-lain).

Namun di antara berbagai faktor pendukung tersebut, tampaknya perebutan sumber air merupakan faktor penyebab konflik yang utama. Bagi warga Beji yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada pembudidayaan ikan air tawar – selain sektor pertanian – air merupakan sumber daya yang sangat vital. Di musim peng-hujan, mungkin air bukan barang langka, namun ketika musim kemarau tiba, air merupakan sumber daya yang diperebut-kan. Letak Desa Beji yang secara geografis terletak di bawah Desa Karangnangka, di musim itu seringkali tidak mendapatkan air karena sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh warga desa di atasnya. Oleh karena itu, tidak jarang mereka melakukan pen-curian air dengan membobol aliran air di sawah-sawah milik warga Karangnangka. Persoalan air ini diakui oleh seorang infor-man, seperti dituturkan sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari aspek sejarahnya, sebenarnya konflik antara Beji Karangnangka sudah ada sejak dahulu, meski dulu tidak sampai terjadi konflik

Padahal kehidupan mereka sangat tergantung kepada air. Oleh karena itu:

“Wong Beji nek masalah banyu kompak. Apalagi di musim kemarau, orang Beji sering naik ke Karangnangka dan membuka saluran air yang ke Beji, sehingga mengalir sepenuhnya ke Beji.”

Adanya berbagai faktor pendukung munculnya konflik yang memang sudah berakar sejak lama, diperparah oleh pandangan warga Beji terhadap kinerja aparat yang mereka anggap tidak adil. Kekecewaan terhadap aparat kepolisian ini melatarbelakangi perilaku warga Beji untuk main hakim sendiri dalam mengatasi setiap persoalan. Selama ini, aparat kepolisian dianggap selalu memihak warga Desa Karangnangka. Setiap ada keributan, warga Beji selalu dianggap sebagai biang keladinya.

Stigma bahwa pemuda Beji merupakan biang keributan di wilayah Kedungbanteng, juga diakui oleh aparat keamanan di wilayah tersebut. Seorang informan, Dar. – yang berprofesi sebagai aparat keamanan menuturkan berikut ini:

“...kalau ada keributan di wilayah Kedungbanteng, pasti biangnya anak Beji, sehingga untuk mengamankan-nya cukup ‘menciduk’ orang-orang yang dianggap biang keributan.”

Bertolak dari hasil temuan di atas, terungkap bahwa selain disebabkan oleh kondisi-kondisi yang bersifat objektif seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran penduduk, dan masalah air, konflik

antardesa ini juga disebabkan oleh kesalahpahaman antara kedua pihak yang sudah berurat berakar. Untuk itu, selain perlu perbaikan kondisi-kondisi tersebut, juga diperlukan ruang yang lebih lebar untuk mencairkan kesalahpahaman di antara mereka. Misal, dengan menghidupkan kembali tradisi karnaval kecamatan yang melibatkan seluruh warga, yang sejak tahun 1997 terhenti. Sebab, menurut penuturan seorang informan, ketika tradisi ini masih berjalan konflik tidak pernah pecah menjadi tawuran.

KESIMPULAN

Kondisi pendukung munculnya konflik antardesa di Kecamatan Kedungbanteng sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk dan banyaknya penduduk usia produktif yang menganggur, terutama di Desa Beji. Dari penelitian ini juga terungkap bahwa di antara kedua desa memiliki pandangan negatif terhadap pihak lain. Masyarakat Kelurahan Beji melihat bahwa orang Karangnangka memiliki karakter *sok priyayi*, *sombong*, individualistik, dan suka memanfaatkan kedekatan mereka dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Walaupun penduduk yang menjadi pegawai jumlahnya tidak jauh berbeda dibanding Desa Beji, namun mereka itu kebanyakan keturunan orang-orang yang memiliki “pengaruh” di desa

Perguruan Silat “Asma,” sehingga di masa lalu orang-orang Beji sangat ditakuti oleh masyarakat Kedungbanteng dan sekitarnya. Meski masa itu telah lama berlalu, namun tampaknya sisa-sisa “kejawaraan” mereka masih ada. Namun di antara berbagai faktor pendukung tersebut, tampaknya perebutan sumber air merupakan faktor yang utama. Masyarakat Beji yang banyak memiliki kolam ikan sebagai sumber hidup mereka, sering berebut air – terutama pada musim kemarau dengan masyarakat Karangnangka, yang kebetulan letaknya di atas. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah setempat agar segera mengupayakan langkah-langkah untuk mengurangi tingginya angka pengangguran terutama di Desa Beji. Selain itu, hendaknya pihak-pihak yang terkait dengan persoalan ini (warga Desa Beji dan Desa Karangnangka, aparat desa dan kecamatan, aparat keamanan, pemda) dapat lebih membuka ruang-ruang komunikasi, dan yang tak kalah penting pihak keamanan

hendaknya dapat bertindak profesional dan tidak memihak dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Horton, P.B. dan C.L. Hunt. 1991. Sosiologi. Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Marzali, A. 2001. Kekerasan Sosial di Kalimantan: Sebuah Analisis Antropologi Sosiokultural. Jurnal CSIS Tahun XXX/2001 No. 3, Jakarta.
- Mas'oed, M., dkk. 2001. Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu. Cetakan ke 2, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Putri, C.E.K.T. 2001. Pemanfaatan Strategi Pengembangan Masyarakat bagi Penumbuhan Sikap Kesetiakawanaan dan Integrasi Sosial Antaretnis di Indonesia. Jurnal CSIS Tahun XXX/2001 No. 3, Jakarta.
- Sunarto, K. 1998. Pengantar Sosiologi. Cetakan Kedua, FE UI, Jakarta.
- Waxman, C.L. 1977. The Stigma of Poverty: a Critique of Poverty Theories and Policies.